

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Neni Nurhayati<sup>1</sup>, Amir Hamzah<sup>2</sup>  
Universitas Kuningan<sup>12</sup>  
[neni.nurhayati@uniku.ac.id](mailto:neni.nurhayati@uniku.ac.id)<sup>1</sup>, [amir.hamzah@uniku.ac.id](mailto:amir.hamzah@uniku.ac.id)<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to determine the effect of Economic Growth and Size of Local Government on Financial Performance of Regional Governments. This research used secondary data. The population of this research is Budget Realization Report, Balance Sheet and Report on the realization PDRB of District / City Government in West Java period 2014-2018. This research uses quota sampling technique. The Sample from this study amounted to 150 data. The analytical methods used in this research are the descriptive and statistic method. The test model selection in this research is Fixed Effect. Based on the results of this research shows that economic growth and size of local government simultaneously affect the financial performance of local governments. partially Economic Growth and Size of Local Government has a positive and significant impact on the Financial Performance of Regional Governments.*

**Keywords:** *Economic Growth, Size of Local Government, Financial Performance of Regional Governments.*

**PENDAHULUAN**

Pemerintah daerah saat ini melaksanakan otonomi daerah, pengelolaan keuanganpun telah mengalami era baru sejak tahun 2000. UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang merupakan revisi dari UU No. 32 Tahun 2004. Dengan diterapkannya kebijakan otonomi pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri semua urusan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah khususnya pada pengelolaan keuangan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan undang-undang. Undang-undang otonomi daerah memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab.

Kinerja keuangan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan terlaksananya aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar di suatu daerah untuk mempertahankan layanan yang dibutuhkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi sebelum pihak eksternal dapat memutuskan untuk berinvestasi di dalam daerah. Peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan tingkat kemandirian dalam suatu pemerintah daerah.

Untuk melihat kemandirian keuangan suatu daerah dapat dilihat melalui Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang merupakan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Transfer. Rasio Kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Halim, 2007:233). Sebagaimana menurut **Departemen Luar Negeri tahun 2004** bahwa kemampuan kemandirian keuangan daerah dikatakan baik apabila mencapai 50%.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Wilayah Jawa Barat selama kurun waktu 5 tahun terakhir pada periode tahun anggaran 2014-2018 dapat diketahui rata-rata kinerja keuangan pemerintah daerah masih dikatakan belum baik karena masih ada Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat yang nilai rata-rata nya masih kurang dari 50%. Fenomena ini menggambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah masih kurang baik. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah menurut Friska Shafira (2018) pada penelitiannya yaitu Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Pemerintah Daerah dan Kemakmuran Pemerintah Daerah.

Beberapa penelitian telah dilakukan Menurut Nina dan Fitri (2017) menguji Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Berbeda dengan penelitian Chrisnadwiheryanti, dkk (2019) yang menguji Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di

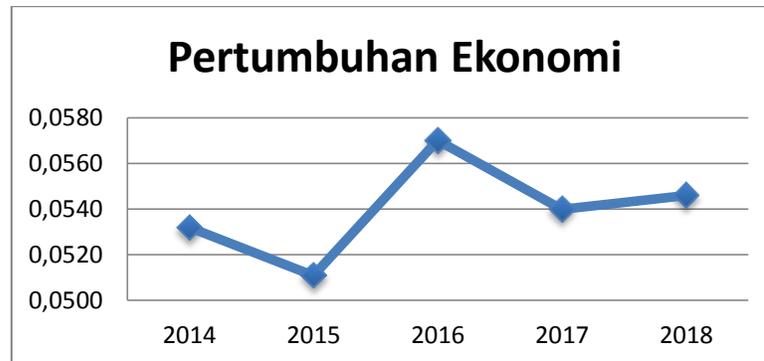
Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitiannya bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian yang dilakukan Putu dan Ni Made (2016) menguji pengaruh, Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah tersebut. Berbeda dengan peneliti Dwi dan Yunita (2019) yang menguji Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. Hasil penelitiannya bahwa Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif karena data yang digunakan berupa data kuantitatif laporan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat periode 2014 s/d 2018 yang dipublikasikan pada website DJPK [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id). Serta Laporan Realisasi PDRB Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat periode 2014 s/d 2018 yang dipublikasikan pada website BPS [www.jabar.bps.go.id](http://www.jabar.bps.go.id). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, maka alat analisis utama yang digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel-variabel yang diteliti dan membuat kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan yaitu menggunakan statistik. Populasi pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Realisasi PDRB Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat periode 2014 s/d 2018. Dimana Provinsi Jawa Barat memiliki Kabupaten/Kota berjumlah 27 yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota atau sebanyak  $27 \times 5 = 135$  data pengamatan. Pengukuran sampel menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 5% (0,05). Jumlah populasi sebagai perhitungan yang digunakan sebanyak 135 LRA, sehingga didapat minimal sampel yang digunakan yaitu 101 LRA atau sebanyak 21kab/kota. Teknik pengambilan

sampel pada penelitian ini adalah *non probability sampling*. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel.

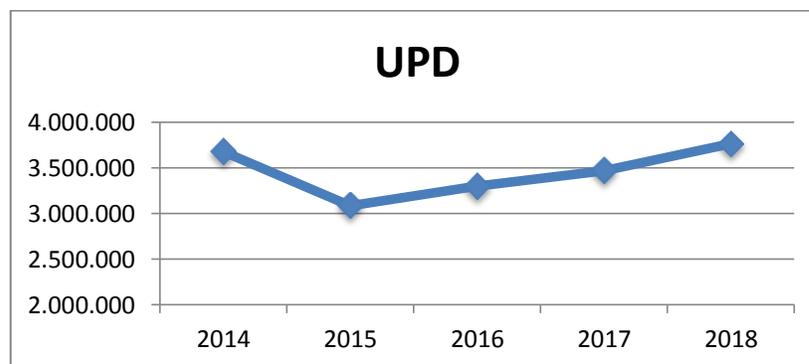
## HASIL DAN PEMBAHASAN



**Grafik 1**

### **Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Se-Wilayah Jawa Barat**

Berdasarkan grafik 1 diatas dapat dilihat bahwa Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Wilayah Jawa Barat selama periode 2014 – 2018 mengalami fluktuatif yang cenderung naik turun setiap tahunnya selama kurun waktu 5 tahun meskipun pada tahun 2015 dan tahun 2017 mengalami penurunan. Kenaikan rata-rata tertinggi dari 21 Kabupaten/Kota Se-Wilayah Jawa Barat terjadi di tahun 2016 sebesar 0,0570.

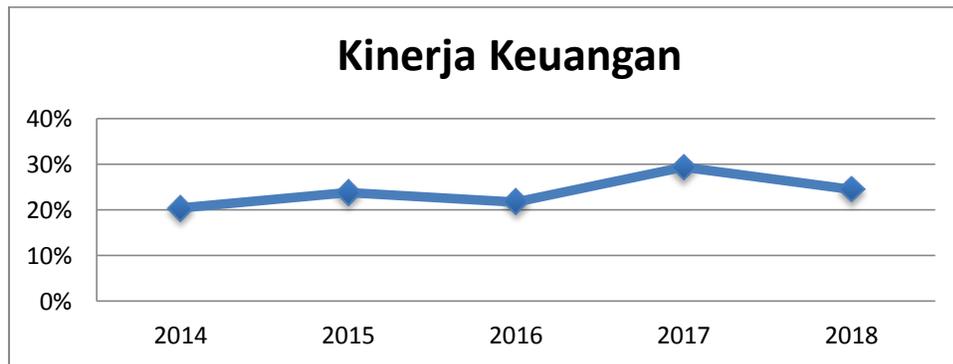


**Grafik 2**

### **Rata-rata Ukuran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Wilayah Jawa Barat**

**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**  
Neni Nurhayati<sup>1</sup>, Amir Hamzah<sup>2</sup>

Berdasarkan grafik 2 diatas dapat dilihat Rata-rata Ukuran Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Se-Wilayah Jawa Barat selama periode 2014 – 2018 mengalami fluktuatif yang cenderung naik turun setiap tahunnya selama kurun waktu 5 tahun meskipun pada tahun 2015 mengalami penurunan. Kenaikan rata-rata tertinggi dari 21 Kabupaten/Kota Se-Wilayah Jawa Barat terjadi di tahun 2018 sebesar Rp. 3.949.189.

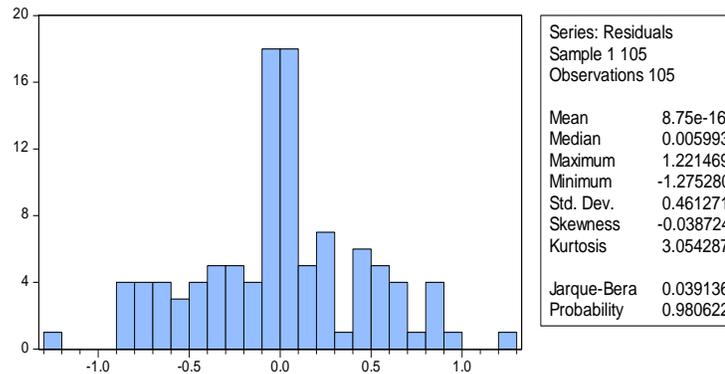


**Grafik 3**  
**Rata-rata perkembangan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Wilayah Jawa Barat**

Berdasarkan grafik 3 diatas dapat dilihat bahwa Rata-rata Kinerja Keuangan pada pemerintah daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Wilayah Jawa Barat selama periode 2014 - 2018 mengalami fluktuatif yang cenderung naik turun setiap tahunnya selama kurun waktu 5 tahun meskipun pada tahun 2014, tahun 2016 dan tahun 2018 mengalami penurunan. Kenaikan rata-rata tertinggi dari 21 Kabupaten/Kota Se-Wilayah Jawa Barat terjadi di tahun 2017 sebesar 29%.

## Hasil Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas



Sumber : Hasil Output Eviews Version 10, diolah (2020)

**Gambar 4**

### Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 4 diatas dapat diketahui bahwa nilai *probability* atau *p-value* adalah sebesar  $0,980622 > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal, sehingga data tersebut memenuhi Uji Normalitas.

### Uji Multikolinieritas

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

	PE	UPD	KK
PE	1.000000	0.054565	0.143869
UPD	0.054565	1.000000	0.002715
KK	0.143869	0.002715	1.000000

Sumber : Hasil Output Eviews Version 10, diolah (2020)

Berdasarkan tabel 1 diatas didapatkan bahwa semua variabel independen nilai koefisien korelasinya  $< 0,8$ . Artinya tidak melebihi batas standar. Artinya  $H_0$  diterima

dan  $H_a$  ditolak maka dapat dinyatakan tidak terjadi Multikolinieritas dalam model Regresi pada penelitian ini.

### Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**  
Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.617443	Prob. F(5,99)	0.6868
Obs*R-squared	3.175300	Prob. Chi-Square(5)	0.6730
Scaled explained SS	6.135046	Prob. Chi-Square(5)	0.2933

Sumber : Hasil Output Eviews Version 10, diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 2 diatas, diperoleh bahwa nilai *p-value Obs\*R-Square* sebesar  $0,6730 > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang artinya lebih besar dari taraf signifikansi sebesar  $0,05$  maka dapat dinyatakan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

### Uji Autokorelasi

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Autokorelasi**  
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.719618	Prob. F(2,99)	0.0708
Obs*R-squared	5.416360	Prob. Chi-Square(2)	0.0667

Sumber : Hasil Output Eviews Version 10, diolah (2020)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai Prob. Chi-Square sebesar  $0,0667 > 0,05$  . Maka  $H_0$  diterima yang artinya dalam penelitian ini tidak terjadi Autokorelasi.

### Hasil Uji Hipotesis

Penelitian ini menemukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dan Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.413628	1.501493	2.939493	0.0043
PE?	0.952218	0.275042	3.462087	0.0009
UPD?	0.397280	0.193536	2.052740	0.0433

Sumber : Output Eviews 10 (diolah)

Berdasarkan tabel 4 pengujian variabel Pertumbuhan Ekonomi diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  untuk Pertumbuhan Ekonomi 3.462087, untuk nilai  $t_{tabel}$  dimana tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% atau  $\alpha$  0,05 dan derajat kebebasan (df) =  $n-k=105-2= 103$ , maka diperoleh  $t_{tabel}$  1.65978 karena  $-t_{hitung} > -t_{tabel}$  ( $3.462087 > 1.65978$ ) dan tingkat signifikansi  $0,0009 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan tabel 4 pengujian variabel Ukuran Pemerintah Daerah diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  untuk Ukuran Pemerintah Daerah 2.052740, untuk nilai  $t_{tabel}$  dimana tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% atau  $\alpha$  0,05 dan derajat kebebasan (df) =  $n-k = 105-3 = 103$ , maka diperoleh  $t_{tabel}$  1,65978, karena  $-t_{hitung} > -t_{tabel}$  ( $2.052740 > 1,65978$ ) dan tingkat signifikansi  $0.0433 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya Ukuran Pemerintah Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.**

Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi yang mengarah pada peningkatan barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan pendapatan daerah yang harus dipacu pertumbuhannya. Pemerintah daerah dengan pendapatan yang besar diharapkan mampu memberikan kinerja yang baik. Jadi dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan besarnya tingkat potensi daerah maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nina dan Fitri (2017) Nurlaela, dkk (2018) dan penelitian Antonius, dkk (2017) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

### **Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Ukuran Pemerintahan Daerah dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan besar atau kecilnya ukuran pemerintah daerah. Besar kecilnya ukuran pemerintahan daerah dapat dilihat dari total aset yang diperoleh daerah dalam satu tahun. Apabila pemerintahan memiliki ukuran yang besar maka dimungkinkan untuk memberikan kemudahan dalam kegiatan bisnis, yang akan memudahkan dalam memberikan layanan masyarakat yang sesuai. Besarnya ukuran daerah juga memberikan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitasnya.

Semakin besar total aset semakin besar tuntutan yang diberikan kepada pemerintah daerah tersebut, besarnya tuntutan dari publik akan mendorong pemerintah untuk dapat meningkatkan kinerja. Jadi dapat dinyatakan bahwa dengan jumlah aset

pemerintah daerah yang tinggi akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memadai. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiyan Natoen dkk.,(2019), Indah (2016), dan penelitian yang dilakukan Putu dan Ni Made (2016) yang menyatakan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian kesimpulan dalam penelitian ini adalah **Pertama** Pertumbuhan Ekonomi dan Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota se-Wilayah Jawa Barat yang diukur dengan menggunakan Rasio Kemandirian. Artinya bahwa perubahan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat diakibatkan oleh naik turunnya Pertumbuhan Ekonomi dan Ukuran Pemerintah Daerah. **Kedua** Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya, jika setiap perubahan variabel Pertumbuhan Ekonomi mengalami peningkatan maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah akan naik dan jika Pertumbuhan Ekonomi mengalami penurunan maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah akan menurun. **Ketiga** Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya, jika setiap perubahan variabel Ukuran Pemerintah Daerah mengalami peningkatan maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah akan naik dan jika Ukuran Pemerintah Daerah mengalami penurunan maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah akan menurun.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ayuningsih, Diyah 2017. “ *Pengaruh Size, Wealth, Leverage, Belanja Daerah dan Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*”:Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Agama Islam Surakarta..

**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Neni Nurhayati<sup>1</sup>, Amir Hamzah<sup>2</sup>

- Dwi, S. dan Yunita, S. R. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik, 9(2) : 110–120.
- Febriyanti, A. N. A., & Ardiani, S. S. (2019). *Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan Tahun 2013-2017)*. Jurnal Riset Terapan Akuntansi, 3(2).
- Ghozali, Imam. (2013). *Analisis Multivariate dan Ekonometri Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Eviews 8*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D.N. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika*, Terjemahan Mangunsong, R.C., Salemba Empat, buku 2, Edisi 5, Jakarta.
- Halim, A & Khususufi. (2012). *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep Dan Aplikasi*. Salemba Empat : Jakarta.
- Heryanti, C. D., Wahidahwati, W., & Suryono, B. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur*. Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, 3(1). 98 -116
- Kuncoro, Mudjarad. (2018). *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*, edisi ke-5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Kusumawardani, M. 2012. *Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Ekonomi UNNES Semarang.
- Manik , Tumpal, 2012. “*Analisis Pengaruh Kemakmuran, Ukuran Pemerintah Daerah , Inflasi , Intergovernmental Revenue dan Kemiskinan terhadap Pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi* “ : Jurnal organisasi dan manajemen Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).
- Maryati dan Endarawati. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat*. Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, Vol 5 No 2.
- Masdianti, Putu Riesty dan Ni Made Adi Erawati. 2016 “*Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah , Kemakmuran , Temuan dan Opini audit BPK pada Kinerja Keuangan*“ : Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udanaya, Bali , Indonesia.

- Minarsih, Ratna Ayu. “*Pengaruh Size, Wealth, Leverage dan Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah*”: Skripsi Akuntansi, Universitas Negeri Semarang.
- Mustikarini, W. A.dan Fitriasari, D. 2012. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.
- Pratama, K. A. D., D. N. S. Werastuti, dan E. Sujana. 2015. *Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, Dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. 3 (1) : 1-12
- Raharja, A. K. Y., Suharno dan Harimurti, F. (2017). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengganguran, Dan Kemiskinan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Wilayah Soloraya Periode 2013–2015)*. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, 13.
- Retnowati, R. 2016. *Analisis Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage dan Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Naskah Publikasi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sari, I., Agusti, R., dan Rofika. (2016). *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatra)*. JOM Fekon, 3(1), 679–692.
- Sesotyaningtyas, Mirna. 2012. *Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Accounting Analysis Journal, Volume 1, No.1 Tahun 2012.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press.
- Suliyanto, 2011. “*Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi SPSS*” Edisi 1. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.

**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Neni Nurhayati<sup>1</sup>, Amir Hamzah<sup>2</sup>

Sumarjo, Hendro. “ *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*”: Skripsi Akuntansi, Universitas Sebelas Maret.

Peraturan Pemerintah (PP) Pasal 4 Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

[www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

<https://cirebonkab.bps.go.id>

<https://indramayukab.bps.go.id>

<https://kuningankab.bps.go.id>

<https://majalengkakab.bps.go.id>

<https://cirebonkota.bps.go.id>

<https://jabar.bps.go.id>